

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA SEPTEMBER 2011

Kegiatan DPR minggu ketiga September 2011, sudah mulai fokus pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR untuk Masa Sidang I tahun 2011-2012. Berikut ringkasan kegiatan DPR pada minggu ketiga September 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

## Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Pada minggu-minggu ini, Komisi dan Pansus masih terus melanjutkan pembahasan beberapa RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, antara lain RUU tentang Intelijen yang berubah judul menjadi RUU tentang Intelijen Negara; RUU tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Perubahan UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Perubahan UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh, RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang BPJS.



tikan dengan surat keterangan dari pengurus Parpol bersangkutan, dan tidak berada dalam satu ikatan pernikahan dengan sesama penyelenggara Pemilu. [4] Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, disepakati merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang memiliki tugas memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. [5] Semua hasil rumusan akan ditindaklanjuti oleh Rapat Panja Penyelenggara Pemilu, dan selanjutnya pada tanggal 20 September, akan dilaksanakan Pembicaraan Tingkat II.

Pada tanggal 8 September, Timus dan Timsin RUU Penyelenggara Pemilu telah memberikan laporan ke Panja Komisi II DPR-RI yang antara lain menyebutkan bahwa: [1] Timus dan Timsin telah melakukan penyesuaian redaksional RUU dengan mengacu pada kaidah bahasa dalam pembahasan RUU berkaitan dengan substansi yang telah disepakati dalam Panja, juga telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk mendapatkan persetujuan forum Panja. [2] Disepakati bahwa RUU ini merupakan "RUU Penggantian" karena perubahannya sudah melebihi 50% guna memudahkan pengaturannya. Perubahan lain adalah nomenklatur "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" menjadi "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengikuti UUD 1945". [3] Perubahan persyaratan calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yakni: berpendidikan paling rendah S-1, mampu secara jasmani dan rohani, tidak perlu jangka waktu pengunduran diri bagi calon anggota yang berasal dari anggota Parpol, pada saat mendaftar **tidak lagi menjadi** anggota Parpol yang dibuk-

## Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Kegiatan pelaksanaan fungsi anggaran akan dilaporkan dalam bentuk intisari dari Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI Terhadap RUU Tentang APBN 2012 Beserta Nota Keuangannya.

Penyusunan Rancangan APBN Tahun 2012 termasuk dalam menentukan asumsi dasar ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, prioritas RKP 2012 yang menjadi acuan dalam perencanaan alokasi anggaran, serta target defisit dan rencana pembiayaannya. Pemerintah berpegang pada hasil-hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR-RI, dan pertimbangan DPD dalam forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2012 yang lalu. Penyusunan RAPBN Tahun 2012 juga telah mengakomodir berbagai prakarsa baru dalam rangka mempercepat pencapaian berbagai sasaran strategis yang tertuang dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maupun inisiatif-inisiatif baru sesuai direktif Presiden. Pendanaan MP3EI tersebut, merupakan kolaborasi antara dana

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG-JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap saat memimpin rapat Panja Mafia Pemilu

APBN, dana APBD, dana BUMN dan BUMD, serta dana masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, alokasi anggaran di berbagai Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN 2012 akan diarahkan untuk menyukseskan MP3EI tersebut.

Sementara itu, inisiatif-inisiatif baru sesuai dengan direktif Presiden, yang merupakan sarana dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, pada dasarnya terdiri atas tiga sasaran strategis. *Pertama*, percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. *Kedua*, pelaksanaan klaster empat, yang mencakup 6 program utama, meliputi rumah sangat sederhana dan rumah murah; kendaraan angkutan umum murah; air bersih untuk rakyat; listrik murah dan hemat; peningkatan kehidupan nelayan; serta peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Keenam program klaster empat tersebut merupakan tambahan dari 3 klaster program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang berjalan selama ini, yaitu: (a) Klaster I, meliputi: Program-program Jamkesmas, Raskin, PKH, BOS, dan beasiswa bagi siswa miskin; (b) Klaster II, meliputi: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); dan (c) Klaster III: Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Ketiga*, peningkatan langkah-langkah dalam rangka mencapai ketahanan pangan, dengan mewujudkan tercapainya surplus beras 10 juta ton per tahun dalam kurun waktu 5-10 tahun, perluasan lapangan kerja, serta penanganan transportasi kota-kota besar, khususnya Jakarta.

Permasalahan yang harus kita hadapi pada tahun 2012 mendatang, antara lain kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal, kondisi infrastruktur, dan efektivitas birokrasi. Sementara itu, risiko yang perlu diwaspadai dari perkembangan kondisi ekonomi global pada tahun 2012, diantaranya bersumber dari krisis fiskal dan utang beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global, kenaikan harga minyak mentah du-

nia dan harga komoditas pangan, serta arus modal jangka pendek. Di lain pihak, risiko yang berasal dari faktor domestik, diantaranya bermuara pada keterbatasan pembiayaan infrastruktur, cadangan sumber energi primer dan kondisi iklim, juga harus diwaspadai. Disamping itu, pengendalian inflasi juga masih merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian yang serius pada tahun mendatang.

Dengan mencermati berbagai masalah, tantangan, dan peluang kedepan, maka orientasi kebijakan pembangunan ekonomi dalam tahun 2012 akan diarahkan untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan orientasi kebijakan pembangunan tersebut, Pemerintah dan Dewan dalam forum Pembicaraan pendahuluan APBN 2012, sepakat untuk menempatkan “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012.

### **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Telah dilakukan RDP Panja Mafia Pemilu Komisi II dengan Komisi Pemilu pada 13 September 2011 dengan agenda Tindak Lanjut Pengaduan Kasus-Kasus Pemilu (Caleg DPR dan Caleg DPRD) dan Pilkada. Ada 7 Pokok Pembicaraan diantaranya Komisi II mempertanyakan KPU tentang proses peradilan di MK. KPU tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus Pemilu berdasarkan keinginan pihak pengadu. Dalam menetapkan perolehan kursi, KPU hanya menjalankan putusan MK. Panja Mafia Pemilu masih ingin mendalami tentang proses perubahan daerah pemilihan yang dilakukan KPU karena keputusan tersebut sangat janggal karena dilakukan setelah Pemilu selesai. Kesimpulan RDP antara lain: [1] Panja Mafia Pemilu akan melakukan pendalaman kasus secara bertahap dengan KPU. Pada pertemuan berikutnya, KPU harus menyiapkan bahan dan bukti-bukti materiil terkait dengan kasus-kasus yang sedang dibahas, selain itu,

KPU juga harus menghadirkan orang yang terlibat langsung dengan perkara seperti: pihak pemohon dan KPU Daerah, sehingga proses rekonstruksi kasus dapat dilakukan. [2] kasus-kasus Pemilu yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya adalah kasus penetapan kursi bagi Caleg PPP di Dapil Sumatera Selatan I, kasus perselisihan perolehan suara an-



Ketua KPU Hafiz Anshari (tengah) beserta anggota KPU

tara PKB dan Gerindra di Prov. Lampung, kasus tentang perubahan Dapil dan Kuota anggota DPRD di Tangerang Selatan dan kasus-kasus Pilkada.

Raker Komisi IX DPR-RI dengan Menakertrans RI mengagendakan pembahasan perkembangan program transmigrasi. Kesimpulan Raker antara lain Komisi IX mendesak Menakertrans-RI untuk meningkatkan pengawasan internal dan mendorong berlangsungnya *good governance* untuk meningkatkan Kinerja Kemenakertrans RI. Komisi IX meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus keterlibatan 2 orang pejabat Kemenakertrans RI dan pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam kasus tersebut. Komisi IX akan melanjutkan Panja Transmigrasi untuk lebih melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap program transmigrasi, dan akan membentuk Panja Konsorsium Asuransi TKI.

RDP Komis II dengan Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional 12 September 2011 dengan agenda pembahasan perubahan RKA K/L tahun anggaran 2012. Pokok pembicaraan antara lain, target keuangan yang akan dicapai BPN-RI tahun 2012, *pertama*, program pengelolaan pertanahan yang terdiri dari peta pertanahan, legalisasi aset tanah, pengaturan dan penataan pertanahan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, penanganan dan pengkajian sengketa dan konflik pertanahan. *Kedua*, program pengelolaan sarana dan prasarana aparatur BPN-RI terdiri dari program pembangunan gedung, pembagunan

gedung arsip, rehabilitasi gedung. *Ketiga*, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN-RI. *Keempat*, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatr BPN-RI. Kesimpulan RD antara lain, Komisi II meminta agar dalam penyusunan kegiatan dan alokasi anggaran harus benar-benar menitik beratkan pada kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

## Diplomasi Parlemen

Persiapan Sidang Umum ke-32 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 19-24 september di Phnom Penh Kamboja. Tema Sidang Umum ini yaitu: *The Role of AIPA in Building a Prosperous ASEAN Community*. Indonesia akan berpartisipasi penuh dalam acara ini, dengan mengirim delegasi sejumlah 15 anggota DPR (sesuai dengan aturan) terdiri dari berbagai fraksi. Delegasi akan dipimpin dengan saudara Priyo Budi Santoso sebagai wakil ketua delegasi dan didampingi oleh Ketua BKSAP.

Dalam delegasi juga ada delegasi wanita sebanyak 4 orang yang akan ikut serta dalam pertemuan WAIPA sehari sebelum Sidang Umum di mulai. Delegasi telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk bantuan penuh dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kamboja. Delegasi Indonesia mengikuti kegiatan sejak awal sampai dengan penutupan tanggal 23, karena akan menerima penyerahan kepresidenan AIPA untuk satu tahun kedepan. Delegasi membagi diri dalam Komisi-komisi yaitu Komisi Politik, Ekonomi, Sosial dan Organisasi. Delegasi juga akan berpartisipasi penuh dalam Dialog dengan Observer.

Dalam Komisi Politik akan dibahas 4 topik antara lain: [1] *strenghtening ASEAN political-security community through intensifying regional cooperation and integration*, [2] *promoting and building a trust oriented community through consolidating and strenghtening of ASEAN's solidarity for prosperity in he region*. Komisi Ekonomi membahas 2 topik: [1] *promoting economic growth for sustainable development toward narrowing the development gap in ASEAN*, [2] *climate change: challenges and adoption for economic growth*. Komisi sosial membahas 4 topik antara lain: *strenghtening law enforcement to combat trafficking in person*. Komisi organisasi, Indonesia akan mengusulkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa di dalam sidang-sidang AIPA dengan merubah statuta AIPA artikel 18.

Berkaitan dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33 tahun 2012, Pimpinan DPR dan BKSAP telah menetapkan lokasinya di Jogyakarta bulan September 2012. Tentang tanggal yang pasti akan kita bicarakan kemudian. Serah terima Presiden AIPA akan dilakukan pada tanggal 23 September, pada saat Penutupan Sidang dalam suatu upacara *Closing Ceremony* dan penandatanganan Transfer of Office President AIPA.\*

\*\*\*

# Panja Mafia Pemilu Dalami 52 Laporan Kecurangan

Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR RI akan mendalami dan menelusuri 52 laporan kecurangan pemilu dengan meminta penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), demikian diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap saat RDP dengan KPU di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/9).



Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR saat rapat dengan KPU

“Ada sebanyak 52 laporan tentang kecurangan pemilu yang dilaporkan masyarakat kepada Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI,” katanya.

Rapat yang dipimpin oleh Chairuman Harahap tersebut dihadiri anggota Komisi II DPR RI serta mitra kerjanya yakni Ketua KPU Hafiz Anshari beserta anggota.

Ia menambahkan, dalam mengungkap mafia pemilu, Panja Mafia Pemilu Komisi II tak hanya mengungkap surat palsu Mahkamah Konstitusi, tapi juga kasus-kasus lain yang cukup signifikan serta ada data-data awalnya. “Dari 52 laporan tentang kecurangan pemilu yang dilaporkan masyarakat, kasusnya cukup beragam,” ungkapnya.

Lebih lanjut politisi dari Partai Golkar ini akan meminta penjelasan dari KPU yakni kasus-kasus yang cukup signifikan.

Sebelumnya Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI sudah mengungkap kasus surat palsu Mahkamah Konstitu-

si guna mengatur calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I menjadi anggota DPR RI periode 2009-2011.

Kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, menurut dia, setelah diungkap melalui Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI persoalannya

sudah menjadi terang-benderang, siapa saja pihak-pihak yang terkait.

“Sangat disayangkan, Polri belum menetapkan pihak terkait dan pengguna surat palsu MK tapi malah menetapkan saksi pelapor yang menjadi korban sebagai tersangka,” katanya.(nt) foto:Ry/parle



Ketua KPU Hafiz Anshari (tengah) beserta anggota KPU

# Pemberantasan Korupsi Memerlukan Usaha Yang Luar Biasa

“Ketua DPR RI Marzuki Alie tawarkan Paket Peraturan Pemberantasan Korupsi: Pembatasan Transaksi Tunai (Non-Cash Payment), Pembuktian Terbalik, Hukuman Berat dan Pemutihan”



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menjadi pembicara di acara Seminar Nasional “Sistem Pembuktian Terbalik dan Transaksi Keuangan Non Tunai” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Karena Korupsi termasuk extra ordinary crime yang telah masuk kesemua sektor maka diperlukan usaha yang luar biasa serta cara-cara efektif dan komitmen bersama untuk membuat satu aturan. “Kalau tidak dilakukan usaha luar biasa, sulit memberantas korupsi”, kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Marzuki Alie (56) dalam Seminar Nasional “Sistem Pembuktian Terbalik dan Transaksi Keuangan Non Tunai, Strategi Baru Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) di Hotel Aryaduta, Palembang, Senin (12/9).

Pada kesempatan ini Marzuki menawarkan pemikiran bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan transaksi tunai (non-cash payment), menerapkan sistem hukum pembuktian terbalik, memberlakukan hukuman berat bagi para koruptor dan memberikan pemutihan.

Sebagai pembicara utama (key-note speaker) dalam seminar ini, Marzuki Alie menjelaskan tawaran paket

ini dapat diundang-undangkan secara bersama sebagai upaya luar biasa memberantas korupsi. Karena korupsi termasuk extra ordinary crime yang telah masuk semua sektor, perlu dibuat cara-cara efektif dan komitmen bersama untuk membuat UU ini karena tantangannya sangat besar. “Kalau tidak dilakukan usaha luar biasa, sulit memberantas korupsi,” tegas kandidat doktor di Universiti Utara Malaysia ini.

Pembatasan transaksi tunai atau uang kas diperbankan penting dilakukan untuk membatasi ruang gerak koruptor yang akhir-akhir ini sering menggunakan cash payment dalam transaksinya. Non-cash payment juga mempermudah pemerintah melakukan kontrol peredaran uang di masyarakat.

Hanya saja, lanjut alumnus Unsri ini diperlukan instrumen hukum seperti setingkat peraturan Bank Indonesia atau UU yang lebih kuat tentang pembatasan transaksi non tunai. “Kalau transaksi dibatasi Rp 5 juta misalnya, orang yang akan menyuap tidak

akan bisa lebih dari nilai itu,” jelas Marzuki dihadapan sekitar 400 peserta seminar yang hadir. Saat ini, lanjut Marzuki, semakin sulit melakukan upaya pemberantasan korupsi karena cara-cara yang digunakan semakin canggih. Koruptor tidak lagi melakukan transaksi antar bank karena mudah dilacak PPAK (Pusat Pemeriksaan dan Analisa Transaksi Keuangan).

Modus korupsi berubah dengan memberikan uang tunai. “Korupsi dilakukan dengan ‘kardus duren’, ‘boks mobil’, bagaimana PPAK bisa melacaknya?” ujar Marzuki. Pembatasan maksimum transaksi perbankan ini, menurut Marzuki sesuai dengan pasal 6 (d) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK. Marzuki menilai pemberlakuan kebijakan ini tidak hanya memperkuat sistem perbankan untuk menghindari rush (penarikan besar-besaran) tetapi dapat pula meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Penanganan korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan (extra ordinary crime), menurut Marzuki juga harus didukung dengan memberlakukan sistem hukum pembuktian terbalik. “Perlu dibuat UU yang khusus mengatur praktek ini,” tegas Marzuki.

Meski dalam beberapa aturan hukum seperti pasal 5 ayat 1 Perppu No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12B, 37, 37A, 37B dan 38 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menyinggung tentang pembuktian terbalik tetapi tidak sistem hukum ini tidak pernah diatur dengan tegas.

Tidak heran jika praktek penanganan kasus korupsi di Indonesia tidak

pernah menggunakan sistem pembuktian terbalik. Padahal sistem ini telah diberlakukan di beberapa negara seperti Hongkong, Malaysia dan Singapura dan dinilai cukup efektif untuk memberantas korupsi.

Kelambanan penerapan sistem hukum ini tidak hanya karena landasan hukum yang tidak jelas tetapi juga pengaruh minimnya pemahaman aparat penegak hukum pada substansi dan cara penerapan pembuktian terbalik dalam penyelesaian kasus korupsi.

Tetapi, lanjut Marzuki, jika pembuktian terbalik dapat dilakukan, upaya pemberantasan korupsi juga harus dibarengi dengan memberlakukan hukuman berat bagi warga negara yang terbukti melakukan korupsi. Dalam

UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan koruptor dapat dihukum pidana mati, seumur hidup atau penjara lama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar serta pidana tambahan. “Sedangkan Indonesia tidak pernah memberi sanksi pidana mati, remisi justru banyak diberikan pada koruptor padahal cukup bisa memberikan efek jera,” kata Marzuki. Hingga saat ini tercatat beberapa negara telah berhasil melawan korupsi dengan memberlakukan hukuman maksimal bagi para koruptor seperti Cina dengan hukuman mati dan Latvia dengan UU Pemotongan Generasi.

Tiga gagasan peraturan pemberantasan korupsi di atas, tegas Marzu-

ki akan sulit dilakukan jika tidak dilakukan pemutihan. “DPR akan enggan membuat UU yang berpotensi menjerat dirinya sendiri,” jelas Marzuki.

Pemutihan dilakukan dengan berbagai persyaratan tertentu bagi koruptor misalnya dengan mengembalikan uang hasil korupsi ke negara sebelum diampuni. “Langkah ini menjadi awalan penting dilakukan untuk memudahkan pemulangan pelaku tindak pidana korupsi yang lari ke luar negeri.

Pemutihan dapat juga berlaku untuk para pemilik “uang abu-abu” dengan mengembalikan ke negara sebelum pemberlakuan sanksi hukuman berat. “Tapi untuk mereka telah masuk proses hukum tetap dilanjutkan,” jelas Marzuki. (LSS) foto: parle

## Wakil Ketua DPR Anis Matta Terima Dubes Sudan

Wakil Ketua DPR Anis Matta berkesempatan menerima kedatangan Duta Besar (Dubes) Sudan Ibrahim Bushra Mohamed Ali di Ruang Kerjanya Gedung Nusantara III Lt.4, DPR, Jakarta, Rabu (13/9).

Menurut Anis Matta, kedatangan Dubes Sudan karena mendapat tugas dari pemerintahnya guna menjelaskan situasi terakhir Sudan setelah terjadinya pemisahan negara Sudan Selatan, khususnya mengenai konflik-konflik yang terjadi diperbatasan. “Pada intinya beliau menjelaskan hal tersebut,” tegas Anis.

Ia menambahkan, pelaku pemberontakan menurut penjelasan Dubes Sudan, adalah bagian dari manuver pemerintahan selatan dengan cara membuat gerakan pemberontakan di dalam wilayah Sudan Utara yang telah diketahui bukan dari kelompok etnis arab.

“Namun perkembangan terakhir, situasi tersebut telah berhasil diredam oleh pemerintah Sudan Utara dan sudah tidak ada lagi pemberontakan,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Anis Matta bersama dengan Dubes Sudan juga membicarakan mengenai hubungan bilateral



Wakil Ketua DPR Anis Matta menerima kedatangan Duta Besar Sudan Ibrahim Bushra Mohamed Ali

kedua negara, khususnya dalam hal penguatan kesejahteraan ekonomi.

“Sebelumnya saya sudah melakukan kunjungan ke Sudan, guna membahas hubungan bilateral, dan juga

sudah ada kunjungan delegasi pengusaha Sudan ke Indonesia, begitupun sebaliknya pengusaha Indonesia telah datang ke Sudan,” terangnya. (nt)/ foto:iw/parle

# DPR Fokuskan APBN 2012 untuk Pengentasan Kemiskinan

DPR akan memfokuskan pembahasan asumsi Makro APBN 2012 kepada sektor pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan pekerjaan. Pendapat tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari PKS Kemal Azis Stamboel kepada Parle, Rabu, (14/8).



Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel (foto atas)

Rakyat miskin di Ibukota Jakarta

“Ya, kita berharap hari ini bisa dituntaskan pembahasan. Saya kira sebagian besar konsern dari anggota adalah bagaimana pertumbuhan bisa ditingkatkan termasuk kualitasnya serta inflasi dapat dikendalikan agar tetap rendah. Selibuhnya kita juga konsern terkait dengan pengaruh APBN terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Sehingga untuk itu, kita minta pemerintah bisa meningkatkan tax ratio sampai 13 persen dan alokasi infrastruktur yang diperbesar,” jelasnya di Gedung DPR, hari Selasa, (14/9).

Peningkatan penerimaan pajak, sebaiknya mengoptimalkan Wajib Pajak Pribadi yang kaya dan memang memiliki multiple income, yang belum sepenuhnya patuh. Usaha kecil harus mendapat diskresi agar tidak dipajaki dulu.

Sebagaimana diketahui, Selasa (13/9) kemarin anggota komisi telah

menyampaikan pandangan dan mengajukan pertanyaan dalam Raker bersama Menkeu, Gubernur BI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Kepala BPS. Raker akan memutuskan asumsi pertumbuhan, inflasi, suku bunga SPN dan nilai tukar.

Terkait raker asumsi makro tersebut, Kemal menyampaikan beberapa pandangannya terkait asumsi pertumbuhan, inflasi, suku bunga SPN dan nilai tukar. “Terkait pertumbuhan ekonomi kami memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 6,7 persen adalah target yang realistis di tengah ketidakpastian global. Namun pemerintah masih memiliki ruang domestik yang cukup luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah 7,0 persen. Apalagi realisasi pertumbuhan 2 tahun terakhir, 2009 dan 2010 selalu terjadi deviasi keatas sebesar 0,2-0,3 persen. Jadi kita harusnya lebih progresif mengoptimalkan

sumber daya kita. Termasuk menyelesaikan masalah yang berulang terkait penyerapan yang bermasalah,” tandasnya.

Terkait asumsi inflasi 5,3 persen, Anggota DPR dari Fraksi PKS ini memandang bahwa laju inflasi ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan. Ancaman terbesar inflasi kedepan bersumber dari tekanan harga pada volatile food terutama beras serta kebutuhan pokok lainnya.

“Melonjaknya harga bahan pokok yang juga dikontibusi oleh perubahan cuaca ekstrem sebagaimana terlihat pada tahun 2010 dan 2011 harus menjadi peringatan yang serius. Kenaikan harga pangan yang tinggi memberi pukulan yang signifikan bagi rakyat yang miskin karena pangan mendominasi pengeluaran mereka. Kenaikan garis kemiskinan sebesar 10,39% dari Rp 211.726 menjadi Rp 233.740 per kapita per bulan selama Maret 2010-Maret 2011 adalah bukti beban yang harus mereka tanggung. Dengan kondisi ini sekalipun kemudian ada kenaikan pendapatan tahunan sebesar 10%, karena inflasi yang relatif tinggi, maka sebagian rakyat masih akan tetap miskin,” ujarnya.

Kemal memandang, dalam rangka mengendalikan inflasi secara lebih kuat, pemerintah perlu mengambil beberapa kebijakan jangka pendek, seperti: (1) memperbaiki manajemen stok dan distribusi pangan nasional dalam rangka stabilitas harga pangan; (2) pemerintah perlu memperbaiki harga pembelian di tingkat petani agar penyerapan stok Bulog optimal; (3) menindak aksi penimbunan dan spekulasi kebutuhan pokok terutama beras secara tegas; dan (4) memperkuat program raskin

dengan cara meningkatkan cakupan dan besaran beras yang diberikan kepada keluarga miskin, serta menurunkan biaya operasional program oleh Bulog yang cenderung mahal dan belum efisien.

“Selain itu untuk jangka menengah, karena inflasi di Indonesia bersifat kronis akibat masih kurangnya infrastruktur dan kapasitas supply, maka dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kapasitas supply produk nasional dan peningkatan produksi beras dan volatile food lainnya,”paparnya.

Terkait asumsi suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,5 persen, Kemal menilai Yield SPN seharusnya masih dapat ditekan lebih rendah karena persepsi investor yang semakin baik terhadap Indonesia dan limpahan capital inflow yang cukup besar. “Kebijakan suku bunga tinggi untuk menarik dana

masuk dan membiayai neraca pembayaran harus dihentikan. Selain karena beresiko tinggi juga menghabiskan banyak sumber daya domestik untuk pihak asing. Kebijakan ini diharapkan juga akan sedikit berkontribusi menjaga perekonomian dari aliran hot money yang terlalu berlebihan dan menyimpan potensi sudden reversal. Dominasi asing yang sangat besar, 60 persen di pasar saham, 35 persen di SBN dan 70 triliun di SBI sudah sangat besar dan tidak sehat,” tegasnya.

Selain itu, Kemal juga meminta agar pemerintah dan BI fokus untuk menekan suku bunga kredit, mengingat spread suku bunga perbankan nasional yang terlalu besar saat ini, dan menjadi yang tertinggi di kawasan. “Rezim suku bunga tinggi juga telah menghambat dinamika sektor riil, menurunkan daya saing dan melemahkan pertumbuhan ekonomi

nasional,”tambahnya.

Terkait asumsi nilai tukar Rupiah Rp 8.800 per dollar AS, Kemal memandangi bahwa nilai tukar Rupiah harus dijaga dari volatilitas yang terlalu ekstrem dan penguatan yang terlalu berlebihan khususnya terkait kecenderungan deindustrialisasi.

“Kami memandang bahwa asumsi tersebut cukup realistis untuk menjaga daya saing industri domestik. Namun pemerintah dan BI harus bekerja keras untuk mencapai hal tersebut mengingat kecenderungan penguatan Rupiah. Kami meminta BI untuk fokus dan secara ketat menjaga stabilitas nilai tukar dalam rangka menjaga daya saing dan stabilitas perekonomian nasional. Rencana mewajibkan hasil devisa dari ekspor dan utang luar negeri masuk dalam sistem keuangan dalam negeri saya kira bagus,” jelasnya. (si) foto: parle

Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa konsep transformasi BPJS 1 untuk program jaminan kesehatan akan dimulai tahun 2014 dan akan dinyatakan dalam bentuk norma pasal dan ayat.

Demikian Ketua Pansus BPJS Ahmad Nizar Shihab saat menutup Rapat Kerja Pansus RUU BPJS DPR RI dengan Pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta, Senin malam (12/9)

“Kemudian akan dilengkapi dengan simulasi program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, mudah-mudahan dengan simulasi dapat ditentukan waktu operasionalisasinya dalam bentuk norma pasal dan ayat,” terang Nizar.

Nizar menjelaskan bahwa pemerintah juga akan membuat simulasi dan waktu pelaksanaan transformasi BPJS 2 (untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun) termasuk implikasi fiskal, hukum, anggaran, dan SDM yang diperlukan dalam menjalankan transformasi tersebut. (sc) foto: parle

## DPR dan Pemerintah Sepakati Konsep Program Jaminan Kesehatan



Jajaran Pemerintah yang mewakili rapat pembahasan BPJS



Pimpinan Pansus BPJS

# Komisi V Dukung Usulan BPWS Percepat Penyelesaian Kegiatan Di Tiga Kawasan

Komisi V DPR RI mendukung usulan Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) untuk mempercepat penyelesaian program/kegiatan pada 3 kawasan (kawasan kaki sisi jembatan Surabaya dan sisi Madura serta kawasan khusus Madura di pantai utara Madura).



Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Soejono



Jembatan Suramadu di Jawa Timur

Komisi V DPR juga mendukung perubahan status jalan provinsi lintas utara Pulau Madura menjadi jalan strategis nasional melalui dana dari APBN.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V Nusyirwan Soejono saat rapat dengar pendapat dengan Bapel-BPWS dan Badan Pelaksana-Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS), Selasa sore (13/9) di gedung DPR.

Komisi V DPR RI juga mendukung Bapel-BPWS agar Kementerian Pekerjaan Umum dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan jembatan Suramadu sebelum terbentuknya BLU-BPWS.

Selain itu, Komisi V DPR RI mende-sak Bapel BPWS untuk melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran pada APBN 2011 dan meminta agar penyampaian laporan penyerapan anggaran Bapel BPWS lebih terinci khususnya terhadap belanja barang, modal, dan pegawai.

Agenda rapat Komisi V sore itu dengan ke dua Badan Pelaksana mem-

bahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2012.

Ketua Bapel BPWS Mohamad Irian mengatakan, seluruh kegiatan tahun 2012 merupakan kegiatan tugas prioritas dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Suramadu yang terkait secara langsung terhadap pencapaian sasaran program prioritas nasional atau Kementerian/Lembaga.

Irian menambahkan, pagu indikatif BPWS Tahun 2012 sebesar kurang lebih Rp 299,5 miliar dari kebutuhan biaya yang diusulkan sebesar kurang lebih Rp 1,3 triliun.

“Dengan pagu indikatif tersebut, kata Irian, kebutuhan untuk operasi pemeliharaan jembatan Tol Suramadu sebesar Rp 30 miliar belum tersedia,” katanya.

Dia menjelaskan, sasaran kegiatan jangka menengah BPWS lima tahun pertama (2010-2014) diantaranya adalah pembebasan lahan untuk pembangunan bangunan publik (Rest Area) dan untuk infrastruktur dan utilitas utama dalam kawasan industri, permukiman, jasa dan wisata.

Selain itu, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan menuju Pelabuhan Peti Kemas di Pantai Utara Madura, pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana untuk pelayanan mendukung kegiatan pengembangan wilayah Suramadu dan membangun rest area dan kawasan wisata di Kawasan kaki Jembatan Sisi Surabaya, Madura.

Dalam periode lima tahun pertama, pihaknya berharap masuknya investor swasta baik investor domestik maupun asing.

Irian menjelaskan, anggaran tahun 2012 ini selain untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, juga yang terpenting untuk pengembangan wilayah Suramadu, diantaranya program-program yang akan dijalankan adalah pelaksanaan rencana teknis, studi kelayakan dan pengembangan SDM, pelaksanaan promosi investasi dan sistem perijinan, pembangunan infrastruktur dan penyiapan kawasan siap bangun termasuk didalamnya pembebasan 365 ha lahan, dan pembangunan infrastruktur kawasan. (tt) foto:tt/parle

# Ketua DPR Tetap Perjuangkan Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi AIPA

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang ditemani oleh Ketua BKSAP, Muhammad Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Aseggaf saat menerima Kunjungan sekjen AIPA, Hon Antonio Veloso Cuenco, di Ruang Pimpinan, Nusantara III, Selasa (13/9).

Sebagian besar negara di Asia adalah merupakan kerajaan melayu, yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dari forum AIPA, tentunya merupakan kebangkitan dari ASEAN.

Hon Antonio mengatakan, secara garis besar dia menyetujui penggunaan bahasa Indonesia, tetapi memang masih ada beberapa Negara anggota AIPA yang belum menyetujui bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi AIPA.

“Kami yakin Indonesia pasti akan dapat menyelesaikan mengenai permasalahan ini dan sebaiknya sebelum sidang mendatang, perwakilan dari Indonesia mengadakan lobi-lobi khusus dengan perwakilan Negara lainnya untuk mempermudah jalannya agar keinginan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Forum AIPA dapat terwujud,”terangnya.

Marzuki menambahkan, mayoritas

“Kita tetap akan terus mengusahakan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam setiap kegiatan di Forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan nantinya dalam Forum AIPA akan kita jelaskan alasan mengapa kita mengusulkan bahas Indonesia menjadi bahasa Resmi AIPA,” jelasnya.

penduduk ASEAN adalah berbahasa Indonesia, sehingga mengapa kita tidak menghargai bahasa yang lahir dari kita sendiri, melainkan menggunakan bahasa asing lain.

“Mengapa kita tidak bangkit sebagai bangsa Asean dengan menggu-

nakan bahasa yang kita miliki dan itu akan menyejajarkan kita dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika. Kita harus dapat menggunakan moment ini sebagai kebangkitan lahirnya Bahasa Indonesia,” pungkasnya. (ra) foto: Ry/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan Sekjen AIPA Hon Antonio Veloso Cuenco

## DPR meminta anggaran Kementerian untuk menuntaskan program strategis

Komisi IV DPR meminta agar alokasi anggaran Kementerian lenih diprioritaskan untuk menuntaskan program-program strategis, seperti menyelesaikan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan selama kurun waktu 2 tahun.

Demikian dikatakan Romahurmuziy saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan perikanan Fadel Muhammad, di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa, (13/9).

Romahurmuziy menambahkan bahwa Komisi IV DPR sangat munduk dengan adanya program terse-

but, mengingat program Kementerian Kelautan dan perikanan tentang penyelesaian pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan dapat membantu para nelayan.

Romahurmuziy juga meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera meningkatkan pro-

gram pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Komisi IV DPR.

Ia juga mengatakan bahwa jumlah anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk APBN tahun



Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (tengah)

2011 telah ditetapkan Pagu Definitif sebesar Rp.4.910.270.642.000,- dan berdasarkan surat edaran No. SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P tahun 2011 terdapat tambahan sebesar Rp.647,954 milyar, ungkap Romahurmuziy.

Selanjutnya juga dikatakan bahwa, menindaklanjuti hasil penggunaan anggaran tersebut berdasarkan laporan dan kementerian kelautan dan perikanan baru terserap sebesar 36,06% per 31 Agustus 2011, dimana jumlah ini dibawah standar. Hasil paling kecil pada Ditjen Perikanan Budi-daya sebesar 28,28%, kedua Ditjet Peri-

kanan Tangkap sebesar 31,22%, ketiga Badan Pengembangan SDMKP sebesar 34,01%.

Ketua Komisi yang sekaligus memimpin rapat juga meminta, yang berkaitan dengan hal tersebut serapan digunakan untuk Balanja Pegawai sebagai pengeluaran rutin sebesar 69,17%, dan yang paling kecil serapannya adalah Belanja Modal sebesar 20,80%. Kecilnya serapan Belanja Modal karena kontrak menunggu DIPA Revisi terbit. Oleh karena itu untuk periode selanjutnya perlu ada reformasi sistem agar pada tiap semester pertama minimal 35% anggaran sudah terserap, dan pada hari ini paling tidak Menteri

sudah menetapkan komitmennya.

Romahurmuziy juga menegaskan, berkaitan dengan Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan perikanan tahun 2012, perlunya kriteria yang jelas tentang kegiatan yang mendukung prioritas nasional, sehingga produktivitas Kementerian semakin meningkat setiap tahunnya, dan serapan anggaran bisa mencapai semaksimal mungkin untuk tiap semester, tegas Romahurmuziy.

Sementara Menteri kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan bahwa, pembangunan 125 unit kapal 30GT dan 23 kapal perikanan 10-30 GT, serta pembinaan dan pengembangan 30 pelabuhan perikanan, termasuk di lingkaran luar, wilayah perbatasan, dan daerah paska bencana, dan pembuatan rumah ikan serta pembuatan sertifikat hak atas tanah nelayan sebanyak 18.000 bidang.

Menteri Kelautan Fadel Muhammad juga menambahkan, bahwa pengembangan data statistik dan nelayan sistem informasi terpadu, termasuk dukungan penyelenggaraan YEOSU Expo di Korea Selatan serta pengembangan kerjasama internasional dan antar lembaga, pembinaan dan koordinasi perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan negara, kepegawaian dan pelaporan kinerja serta laporan keuangan. (Spy). foto:dok/parle

## Basarnas Diminta Berkomunikasi Dengan Kementerian Keuangan Terkait Anggaran

Komisi V DPR RI meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan turunnya pagu anggaran 2012 di Badan ini.

**K**omisi V DPR memprihatinkan dalam RKA-KL 2012, Basarnas hanya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 971,72 miliar, dibandingkan tahun 2010 yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,16 triliun.

Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Badan SAR Nasional dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Se-

lasa (13/9) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Nusyirwan Sujono.

Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Perjuangan, Sadarestuwati mengatakan, turunnya anggaran di badan ini jelas akan berdampak pada pengadaan-pengadaan peralatan-peralatan yang terkait dengan keselamatan.

Padahal, kata Estu, di satu sisi masyarakat menginginkan Basarnas men-

jadi badan yang betul-betul dapat diandalkan dalam urusan penyelamatan.

Sadarestuwati berharap Basarnas dapat segera mengkomunikasikan masalah penurunan ini dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar anggaran Basarnas dapat lebih meningkat lagi. Basarnas harus dapat meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa tugas-tugas yang diemban ke

depan jauh lebih berat dan perlu dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugasnya.

Sebagai contoh, Estu melihat masih banyak kapal-kapal Basarnas yang belum memenuhi persyaratan, khususnya untuk kecepatan. “Bagaimana Basarnas dapat bekerja maksimal kalau peralatan yang dimiliki belum memadai,” katanya.

Senada dengan itu, Rendhy Lamadjido dari fraksi yang sama berharap ada perbaikan-perbaikan terhadap program di Badan ini. Menurut Rendhy, Basarnas masih kurang melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Basarnas dianggap belum bisa memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin.

Untuk itu dia meminta Basarnas lebih maju dalam persoalan-persoalan menganggarkan program dan program-program yang dibuat harus lebih jelas, karena dia melihat dari tiga program yang dijabarkan Kepala Basarnas, dia belum melihat adanya perbaikan profesional individu daripada tim Basarnas itu sendiri. “Padahal ini mutlak diperlukan,” katanya.

Kepala Badan SAR Nasional Daryatmo membenarkan tahun 2011 Basarnas mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1,16 triliun, sedang tahun 2012 hanya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 971,72 miliar dari usulan Basarnas yang disampaikan Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,74 triliun.

Dibandingkan dengan pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 971,72 miliar, maka terdapat kekurangan anggaran (backlog) sebesar Rp 776,17 miliar atau 44,4 persen.

Terkait dengan adanya backlog tersebut, maka tahun 2012 Basarnas berusaha memaksimalkan alokasi anggaran yang tersedia guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana SAR untuk menunjang keberhasilan operasi SAR.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2012 diantaranya adalah program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan, termasuk didalamnya pengadaan sarana dan prasarana SAR, pengadaan peralatan komunikasi SAR, penyelenggaraan Diklat SAR, dan penyelenggaraan latihan SAR.



Anggota komisi V DPR Rendhy Lamadjido

### Fokus Pertanian

Sementara pada kesempatan yang sama, Sadarestuwati meminta kepada BMKG agar anggaran tahun 2012 difokuskan untuk program yang berkaitan dengan pertanian.

Menurut Estu, hal ini penting dan mendesak sebab sekarang ini kita sedang dilanda musim kemarau yang panjang dan ini berdampak pada petani yang dikhawatirkan akan mengalami gagal panen akibat kekurangan air.

Estu juga menambahkan, kita juga harus waspada terhadap ancaman kerawanan pangan, karena di seluruh daerah mengalami kegagalan panen. Untuk itulah sudah saatnya BMKG memfokuskan programnya dan menganggarkan untuk membangun sistem monitoring hujan otomatis (ARG) di setiap kabupaten dan pelaksanaan SLI di daerah sentra pangan. (tt) foto: tt/parle

\*\*\*

# Komisi IX DPR RI Menyetujui RKAKL 2012 Badan POM RI

Komisi IX DPR RI menyetujui RKAKL Pagu Sementara/Anggaran Badan POM RI Tahun 2012 sebesar Rp 950.976.500.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



Anggota Komisi IX DPR Ledia Hanifa

Komisi IX DPR RI juga akan memperjuangkan usulan anggaran kegiatan inisiatif baru sebesar Rp 587.732.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan usulan anggaran untuk remunerasi sebesar Rp 462.209.594.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) pada RAPBN Tahun Anggaran 2012.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz saat menutup Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan POM RI Kustantinah di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (13/9)

“Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk mempertahankan penilaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTF) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011,” kata Irgan.

“Komisi IX DPR RI juga mendorong Badan POM RI agar segera melakukan



Petugas dari Badan POM sedang melakukan pemeriksaan makanan

reformasi total Badan Pom RI, terkait Kelembagaan, Peran, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), SDM serta sarana/prasarana,” tambah Irgan.

## Komisi IX DPR RI Heran Anggaran Badan POM Kecil

Namun saat rapat dengar pendapat tersebut berlangsung, beberapa Anggota Komisi IX DPR RI menyatakan keheranannya. Mengapa demikian beratnya tugas pokok Badan POM RI, tapi anggaran yang diajukan sangat kecil.

Anggota Komisi IX DPR RI Agus Sulistyono (F-KB) menyatakan keheranannya, “Saya melihat anggaran Badan POM sangat kecil padahal tugas pokoknya sangat berat. Mengapa tidak ada peningkatan yang signifikan?,” tanya Agus.

Hernani Hurustiati (F-PG) menyatakan kecewaannya atas anggaran yang diajukan Badan POM, “Saya kecewa, mengapa pagu anggaran RKAKL Tahun 2012 sangat kecil dibanding de-

ngan Tupoksi Badan POM dalam mengawasi obat-obatan serta makanan yang beredar,” imbuh Hernani.

“Apakah Badan POM tidak memiliki Staf yang cangih untuk melobby Bapenas dan Kementerian Keuangan,” katanya lagi.

Sedangkan Hang Ali Saputra Syah Pahan (F-PAN) mempertanyakan mengapa usulan anggaran tambahan nilainya lebih nesar dari induknya, yaitu lebih dari 100%.

Sementara Ledia Hanifa (F-PKS) menyoroti anggaran remunerasi. Ledia mengharapkan dengan adanya remunerasi di Badan POM RI dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja menjadi jelas demikian pula halnya dengan pengawasan dan kreativitas.

“Karena jika komitmen pengawasannya tidak jelas akan menyulitkan. Dan kreativitas dibangun untuk membuat terobosan-terobosan baru. Kreativitas diperlukan untuk membuat posisi Badan POM dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah badan yang penting,” papar Ledia. (sc)foto:parle

# Baleg Minta Masukan KY Terkait UU Mahkamah Agung

**R**UU ini merupakan salah satu RUU yang harus segera dipersiapkan karena masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011.

Dalam rapat dengar pendapat, Selasa (13/9) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub mengatakan, RUU ini diperlukan untuk lebih memantapkan kedudukan Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dan merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Saat ini, katanya, Undang-undang yang mengatur Mahkamah Agung adalah UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali yakni dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dalam rangka penyusunan RUU inilah Baleg memerlukan banyak masukan dan pendapat dari beberapa narasumber/pakar dan beberapa stakeholders lainnya. Masukan dan pendapat tersebut sangat diperlukan untuk penyempurnaan draft RUU yang sedang dipersiapkan Baleg.

Pada kesempatan tersebut Komisi Yudisial memberikan beberapa pokok pikiran terkait dengan perubahan ke tiga atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Ada tujuh hal penting yang disampaikan yaitu terkait dengan pembangunan dan penataan sistem peradilan, pembatasan kasasi dan pembentukan sistem kamar, pengawasan hakim, pengawasan tertinggi dan teknis peradilan, Hakim Agung adalah Pejabat Publik, rekrutmen Hakim Agung dan usia Hakim Agung 70 tahun.

Mengenai pengawasan hakim, Wakil Ketua KY H. Imam Anshori Saleh mengatakan, berbagai peraturan perundang-undangan serta tuntutan reformasi dan tidak efektifnya pengawasan internal oleh Mahkamah Agung adalah alasan-alasan kelahiran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan RI.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta masukan Komisi Yudisial (KY) terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ke tiga atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub

Dengan kehadiran Komisi Yudisial, maka secara normatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim agung adalah Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 32A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pengawasan oleh ke dua lembaga ini dibagi dalam dua kategori yaitu, pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dalam implementasinya ketentuan ini menimbulkan kesulitan, sebab tidak jelas apa makna, persamaan dan perbedaan antara kata “tingkah laku” dan kata “perilaku”. Penjelasan atas pasal tersebut hanya menyatakan pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY.

Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga

diharapkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga. Namun, kata Imam, bila ditelaah secara mendalam kata masih diperlukan menunjukkan bahwa pengawasan internal oleh MA hanya bersifat sementara dan bersifat mendukung pengawasan eksternal yang dilakukan KY.

Mengingat kendala dalam implementasi dan untuk efektifnya pengawasan terhadap hakim agung, Imam mengusulkan perlunya dipertimbangkan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung oleh MA untuk dihapus dan pengawasan eksternal perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Imam juga menggarisbawahi bahwa hakim agung adalah pejabat publik. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa Hakim Agung diusulkan pengangkatannya oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah usia pensiun Hakim Agung 70 tahun. Menurut Imam

batas usia pensiun ini perlu dipertimbangkan mengingat belum mencapai usia 70 tahun banyak Hakim Agung yang sakit atau meninggal.

Selain itu, usia pensiun dimaksud berpotensi menghambat regenerasi hakim agung di Mahkamah Agung dan sekaligus menghambat kesempatan

bagi hakim-hakim karier yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi hakim agung sebagaimana telah ditentukan oleh UU. (tt) foto:parle

# Komisi VIII DPR Setujui RKA-KL Menneg PP dan PA 181 Miliar

Komisi VIII DPR menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 181 Miliar.

Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ahmad Zainuddin saat memimpin Rapat Kerja dengan Menneg PP dan PA, Linda Amalia Sari, di Gedung Nusantara II DPR, Senin (12/9).

Untuk itu, lanjut Zainuddin, DPR meminta kepada Kementerian Negara PP dan PA agar segera menyampaikan rincian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012.

Zainuddin menambahkan, DPR juga meminta kepada Kementerian Negara PP dan PA dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 perlu memperhatikan beberapa catatan dari anggota Komisi VIII, yaitu menguatkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan menguatkan koordinasi lintas sector pusat dan daerah.

Dalam hal usulan penambahan anggaran, DPR akan mempertimbangkan usulan penambahan anggaran Kementerian Negara PP dan PA Tahun Anggaran 2012, kata Zainuddin seraya menambahkan akan dibahas dalam rapat selanjutnya.

Sementara Menneg PP dan PA Linda Amalia Sari dalam paparannya menjelaskan, prioritas usulan penambahan anggaran tahun 2012 adalah untuk tuan rumah the 4th ministerial conference on the role of women in the development of the OIC member states pada tahun 2012 sebesar Rp 10,8 miliar. Persiapan untuk renovasi



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ahmad Zainuddin

gedung Kementerian PP dan PA sebesar Rp 24,552 miliar.

Menurut Linda, menjadi tuan rumah the 4th ministerial conference on the role of women in the development of the OIC member states pada tahun 2012 telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (Sekjen OKI). Hal ini, lanjut Linda, adalah kehormatan bagi bangsa Indo-

nesia bahwa posisinya sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia telah mendapatkan apresiasi dari negara-negara Islam anggota OKI. "Negara Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan salah satu agenda penting bagi pemaparan status dan peran perempuan di kawasan OKI," tuturnya. (iw)/foto:iw/parle.

# KAI Adukan Ketua MA ke Komisi III

Keprihatinan atas kinerja hakim di Mahkamah Agung (MA) mengemuka saat Komisi III menerima aspirasi organisasi pengacara yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/11). Sebagai pihak yang telah memilih hakim agung sepatutnya anggota DPR bertanggung jawab dan melakukan terobosan agar dapat memperbaiki kondisi ini.

“Mahkamah Agung merupakan lembaga penegakan hukum paling agung di negeri ini, harapan rakyat setelah itu tidak ada lagi kecuali pada Tuhan. Dalam politik kita mengenal suara rakyat adalah suara Tuhan. DPR sebagai wakil rakyat tidak boleh membiarkan penegakan hukum oleh hakim jauh dari rasa ke-

cobaan,” jelasnya

Pada bagian lain Presiden KAI juga menyebut Ketua MA telah melanggar pasal 4 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan setiap pengacara yang akan beracara di pengadilan sebelumnya harus disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi. “Dalam UU tidak

Menanggapi hal ini pimpinan sidang Ahmad Yani menilai usulan untuk mencabut kembali mandat yang telah diberikan kepada hakim agung gagal, patut dipertimbangkan. “Usulan DPR mencopot hakim agung itu sudah pernah saya bicarakan. Mereka kita yang angkat, Presiden kan tinggal administratif saja. Apabila dalam melak-



Organisasi pengacara yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia



Anggota Komisi III DPR Ade Surapriatna (kanan atas)

adilan rakyat, jadi kita harus melakukan sesuatu,” papar anggota Komisi III Ade Surapriatna setelah mendengar masukan dari Presiden KAI Indra Sahnun Lubis.

Sebelumnya Indra menyampaikan ketua Mahkamah Agung, Harifin Andi Tumpa disebutnya telah meminta para hakim untuk melanggar undang-undang dengan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi. “Dalam kasus anggota KAI Eggi Sudjana, majelis hakim MK sudah mencabut pasal 134 dan 136 KUHP tentang Penghinaan Presiden sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan, tetapi MA tidak mematuhi itu. Eggi sudjana tetap dihukum 3 bulan penjara 6 bulan per-

disebutkan sumpah itu lewat KAI atau Peradi. Ketua MA mengeluarkan surat edaran sumpah advokat melalui Peradi, ini kan berarti pelanggaran,” tambahnya.

Sebagai perbandingan ia menyebut di Amerika Serikat, pengakuan terhadap advokat pada izin yang diperolehnya bukan pada sumpah di depan hakim. Hal lain yang perlu mendapat perhatian DPR adalah meningkatnya perilaku suap di pengadilan. Ia menyatakan siap menyampaikan bukti terkait hal ini. Selaku Presiden organisasi advokat ia berharap wakil rakyat melakukan terobosan mengusulkan kepada Presiden agar segera mengganti ketua MA.

sanakan tugas mereka bermasalah, melakukan langkah keliru, apa tidak punya hak kita untuk menarik kembali mandat itu,” kata politisi Partai P3 ini.

Pasal yang mengatur tentang hal itu menurutnya akan dirumuskan dalam revisi UU MA yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi. “Perlu diatur mekanismenya, pencabutan mandat jangan hanya berdasarkan alasan subyektifitas. Perlu ada bukti, transparansi karena publik akan dapat menilai apabila ada permainan,” ujarnya. Ia menambahkan seluruh masukan dari KAI akan dibahas dalam rapat internal dan ditindaklanjuti pada rapat konsultasi dengan MA yang akan datang. (iky) foto: iky/parle

# Alokasi Anggaran Kementerian Kehutanan Selama 5 Tahun Sebesar 30 Triliun Lebih

Kementerian Kehutanan telah mencanangkan Sasaran Strategis tahun 2010-2014 yang dalam pelaksanaannya menetapkan 8 program dengan 59 kegiatan.



Ketua Komisi IV DPR H.M. Romahurmuziy (kanan) saat memimpin rapat di gedung Senayan membahas anggaran Kementerian Kehutanan

Dalam melaksanakan program tersebut menetapkan alokasi anggaran sebesar 30 triliun lebih untuk jangka waktu 5 tahun. Demikian yang dikatakan Ketua Komisi IV DPR-RI H.M. Romahurmuziy yang sekaligus memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, rapat dilakukan di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu, (14/9) siang.

Ketua Rapat Romahurmuziy menambahkan, bahwa alokasi anggaran selama 5 tahun sebesar Rp.30.533.910.000.000,- untuk jangka waktu 5 tahun tahun 2010 dianggarkan Rp. 5.882,59 milyar, tahun 2011 dianggarkan Rp.6.000,03 milyar dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.6.110,90 milyar.

Romahurmuziy juga mengungkapkan bahwa, rata-rata kenaikan sebesar 0,02% yang mana hasil ini sangat kecil sekali jika dikaitkan dengan kenaikan inflasi yang berdampak pada besarnya peningkatan anggaran pertahun, ungkap Ketua Komisi IV DPR.

Dia mengatakan, untuk pencana-

ngan 8 program dengan 59 kegiatan yang bisa diselesaikan satu tahun berikutnya, perlu dibuat anggaran per tahapan dan laporan hasil pertahapan yang sudah dicapai, untuk anggaran rutin tidak dimasukkan dalam program tersebut, kata romahurmuziy.

Sementara itu Menteri kehutanan Zulkifli Hasan mengemukakan, berdasarkan prinsip keutuhan, keterpaduan dan keberlanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Renstra kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan sebelumnya.

Zulkifli Hasan mengatakan, bahwa kebijakan prioritas pembangunan kehutanan kedepan secara spesifik dirumuskan untuk pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, konservasi keanekaragaman hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan indus-

tri serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Menteri Kehutan Zulkifli Hasan juga menambahkan, sesuai dengan keputusan menteri Keuangan tentang pagu anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2012, kementerian Kehutanan memperoleh pagu anggaran sebesar 6 triliun lebih yang secara umum diarahkan dalam rangka untuk mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi permasalahan terkait dengan ekonomi dan lingkungan. Implementasinya akan dilaksanakan melalui 8 program yang terdiri dari 4 jenis program teknis kehutanan dan 4 jenis program dukungan administratif, dengan 59 jenis kegiatan.

Dikatakan juga bahwa, berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di atas ditetapkan visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, yaitu "Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan", ungkap Menteri. (Spy) foto:parle

# Pimpinan DPR Tetapkan Pimpinan Baleg

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso Rabu Sore (14/9) menetapkan Ida Fauziah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendampingi tiga pimpinan lainnya yakni Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah (F-PPP) dan Sunardi Ayub (F-Hanura).

**S**ebelumnya, Wakil Ketua Baleg ini dijabat oleh H. Otong Abdurahman dari fraksi yang sama. Otong hanya dua minggu menjadi Pimpinan Baleg, karena setelah itu menjadi anggota Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan tersebut Priyo meminta agar Pimpinan Baleg di awal persidangan diadakan rapat antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Baleg. Karena menurut Priyo, banyak hal yang harus dibicarakan sehubungan dengan fungsi legislasi DPR.

Legislasi kita, kata Priyo banyak mendapat sorotan di berbagai media bahwa capaiannya masih rendah. Dan itu harus menjadi pemikiran bersama dan kerja keras untuk menyelesaikan tugas RUU yang dibebankan.

Priyo juga mengingatkan agar komisi-komisi mematuhi jadwal hari-hari yang telah ditetapkan. Hari Senin dan Selasa itu memang jadwalnya pengawasan, hari Rabu dan Kamis jadwalnya legislasi.

Namun dia menyayangkan masih banyak komisi-komisi yang tidak mematuhi jadwal tersebut, sehingga hari legislasi sering dipakai untuk pengawasan.

Priyo meminta Ketua Baleg untuk tidak ragu-ragu menegur dan mengingatkan RUU-RUU yang telah ditugaskan di komisi yang belum diselesaikan dalam dua kali masa persidangan.

Seusai penetapan Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah, Ketua Baleg menetapkan Panja Penampung Aspirasi terhadap usulan-usulan RUU Prioritas 2012. Ketua Panja ini ditunjuk Ida Fauziah.

Mulyono mengatakan, sampai bulan September masih banyak RUU Prioritas 2011 yang belum dapat diselesaikan, padahal akhir Desember 2011 tinggal dua kali masa persidangan lagi.

Mulyono berharap komisi-komisi dapat mematuhi jadwal legislasi yang



Wakil Ketua Priyo Budi Santoso saat berjabat tangan dengan Ketua Baleg Ignatius Mulyono



telah ditentukan dan untuk mengejar ketertinggalan ini Baleg akan menjadwalkan rapat-rapat pembahasan RUU untuk hari senin dan selasa sore.

Untuk Baleg sendiri, masih ada 14 RUU yang harus diselesaikan dan di komisi masih ada 28 RUU. (tt) foto: iw/parle



# **DENGAN MEMPERINGATI INTERNATIONAL DAY OF DEMOCRACY**

**SEPTEMBER 15**

## **KITA WUJUDKAN HARAPAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT**

